

# **ANALISIS JURNAL**

## **INTEGRASI NASIONAL**

### **SEBAGAI PENANGKAL ETNOSENTRISME DI INDONESIA**

**Nama:** Michael Ismawan

**Kelas:** 2/F

**NPM:** 2413053203

Jurnal ini ditulis oleh Agus Maladi Irianto yang merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Dari dulu hingga sekarang dengan seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia mengalami berbagai peristiwa yang menyebabkan berubahnya azas, paham dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan yang terjadi seringkali menciptakan instabilitas politik dan disintegrasi nasional. Salah satu perubahan yang terjadi adalah peralihan dari orde lama ke orde baru, yang ditandai dengan peristiwa G30S/PKI pada 1965. Pada masa orde baru pemerintah berusaha menciptakan stabilitas politik dengan menerapkan sistem sentralistik. Pada waktu itu Golkar dijadikan mesin politik yang membuat orde baru dapat berkuasa selama 32 tahun. Akan tetapi, pemerintahan sentralistik ini justru menekan pluralitas bangsa, mengabaikan identitas lokal dan menimbulkan ketidakpuasan di berbagai daerah. Kebijakan ini bertentangan dengan karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara plural, yang terdiri dari beribu-ribu pulau, ratusan suku bangsa dan bermacam-macam bahasa daerah. Stabilitas yang dipaksakan oleh Orde Baru akhirnya menimbulkan perlawanan oleh rakyat yang memuncak pada 1998 dan menggulingkan Orde Baru tersebut. Era Reformasi yang lahir setelah Orde Baru membawa kebebasan baru bagi masyarakat, termasuk desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Akan tetapi, Era Reformasi juga membawa tantangan baru bagi bangsa Indonesia desentralisasi seringkali memperkuat identitas nasional secara berlebihan, sehingga melemahkan rasanya persatuan nasional yang seharusnya bisa dijaga. Kebijakan otonomi daerah menimbulkan etnosentrisme, yang dimana setiap daerah lebih mementingkan daerahnya sendiri dan tidak menganggap sebagai satu kesatuan di dalam negara Indonesia. Selain dari pada itu, sering terjadi juga konflik antar etnis, antar agama dan antar daerah yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola pemerintah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pluralisme. Integrasi nasional merupakan kunci untuk menghadapi tantangan yang sedang atau akan melanda Indonesia. Kebijakan otonomi daerah perlu diarahkan untuk mendukung persatuan nasional tanpa perlu mengorbankan identitas lokal. Selain itu, strategi kebudayaan harus dikembangkan untuk menyatukan visi dan misi bangsa ditengah keberagaman masyarakat Indonesia.